

Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Selatpanjang, 27 November 2023

Pt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



selaku
PIHAK PERTAMA

AKBP (PURNAHARJA) H. ASMAR

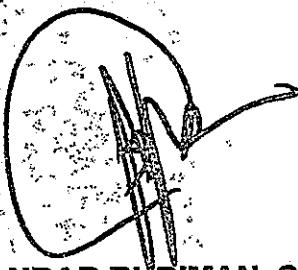
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



selaku
PIHAK KEDUA

FAUZI HASAN, SE., M.IKom
KETUA

H. KHALID ALI, SE
WAKIL KETUA



ISKANDAR BUDIMAN, SE, M.IP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I - 3
1.3. Dasar Hukum	I - 4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 25
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III - 12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	IV - 1
4.1 Target Pendapatan Daerah	IV - 3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	V - 1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V - 3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII PENUTUP	VIII - 1

DAFTAR TABEL

TABEL. 2.1.2.1 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019–2024	II - 7
TABEL. 2.1.2.2 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)	II - 6
TABEL. 2.1.2.3 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 - 2024	II - 6
TABEL. 2.1.2.4 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Persen).....	II - 11
TABEL. 2.1.2.5 Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.....	II - 12
TABEL. 2.1.2.6 Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 – 2024	II - 13
TABEL. 2.1.2.7 Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti	II - 15
TABEL. 2.1.3.1 Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 – 2024	II -17
TABEL. 2.1.4.1 Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 – 2022	II - 18
TABEL. 2.1.5.1 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 - 2022	II - 20
TABEL. 2.1.6.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022	II - 21
TABEL. 2.1.6.2 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022	II - 22
TABEL. 2.1.6.3 Jumlah Penduduk Menurut Sex Ratio Kecamatan Tahun 2022	II -22
TABEL. 2.1.6.4 Perkembangan Sex Ratio Penduduk Menurut Kecamatan	

Tahun 2018 - 2022	II - 23
TABEL. 2.1.6.5 Perkembangan Ratio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Kepuluan Meranti Tahun 2018 - 2022.....	II - 24
TABEL. 2.1.6.6 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Kepuluan Meranti Tahun 2018 - 2022.....	II - 25
TABEL. 2.2.1 Perkembangan Realisasi APBD di Kabupaten Kepuluan Meranti Tahun 2018 - 2022.....	II - 31
TABEL. 2.2.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepuluan Meranti (Milyar) Tahun 2017 – 2021	II - 35
TABEL. 2.2.1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepuluan Meranti (Juta Rupiah) Tahun 2018 – 2020	II - 36
TABEL. 2.2.2.1 PDRB per Kapita Kabupaten Kepuluan Meranti (Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021	II - 37
TABEL. 2.2.2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kepuluan Meranti Tahun 2017 – 2021.....	II - 37
TABEL. 2.2.2.3 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021	II - 38
TABEL. 2.2.3.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 - 2021	II - 39
TABEL. 2.2.3.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 – 2021	II - 40
TABEL. 2.2.4.1 Nilai Investasi Industri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021	II - 41
TABEL. 2.2.4.2 Jumlah Pekerja Industri Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2021	II - 42
TABEL. 3.1.1 Gambaran Ekonomi Makro Nasional	III - 1
TABEL. 3.1.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US\$ (Rp/US\$)	III - 3
TABEL. 3.1.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024	III - 5

TABEL. 3.1.4	Pertumbuhan Tertinggi PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2022 – Triwulan II 2023	III - 6
TABEL. 3.1.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah).....	III - 7
TABEL. 3.1.6	Laju Pertumbuhan dan Sumber Petumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	III - 8
TABEL. 3.1.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi -Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II-2023.....	III - 9
TABEL. 3.1.1.2	Inflasi Bulanan (Persen) Tahun 2023	III - 12
TABEL. 4.1.2	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024	IV - 4
TABEL. 5.1.2	Proyeksi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	V - 4
TABEL. 6.1.2	Proyeksi Pembiayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024	VI - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era otonomi daerah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti berpeluang besar dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui pengoptimalkan pengelolaan segala sumberdaya yang ada dengan didukung oleh posisi daerah yang sangat strategis yang berada pada jalur pelayaran Selat Malaka. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Meranti masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD 2024.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBD untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala

Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024, dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 serta RKP Tahun 2024. Penyusunan KUA dan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dengan berpedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten serta hasil evaluasi kinerja APBD serta identifikasi permasalahan tahun sebelumnya.

Kebijakan Umum APBD disusun guna menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara maupun APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.

Program dan Kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan prioritas utama yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan sumberdaya manusia dan

infrastruktur dan lain sebagainya akan menjadi bagian penting dalam kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini akan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah pembangunan pada tahun 2024 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.

Konsistensi dan koherensi terhadap perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangan urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan prioritas program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam APBD maka disusunlah Kebijakan Umum APBD.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka untuk menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Penetapan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif. Adapun hasil kesepakatan tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan terdiri dari dua bagian utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022/2023 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2024 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta mengacu pada kondisi

perekonomian global, nasional dan Provinsi Riau. Oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada arah kebijakan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Arah kebijakan ekonomi Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Tahun 2024 merupakan tahun Kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Tema yang diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang mengambil tema "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024, maka RKPD Provinsi Riau tahun 2024 juga telah menetapkan Tema "**Mewujudkan Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia**". Dari kedua tema tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti memilih Tema Pembangunan Daerah di dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024, yaitu "**Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Produktivitas Ekonomi, Harmonisasi Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan Dengan Pelayanan Prima**".

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditujukan untuk mewujudkan visi, misi dan isu strategis Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026 serta untuk mengimplementasikan program yang merupakan payung hukum dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 harus sejalan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF). KEMPPKF merupakan bentuk pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat dalam bentuk dokumen yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun mendatang dan di

dalamnya tertuang hal-hal terkait kebijakan makro yang melandasi anggaran APBD. KEMPPKF untuk tahun 2024 di arahkan kepada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastuktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024.

Sebagai solusi untuk memberikan respon secara menyeluruh dan berkelanjutan atas pemulihan kondisi perekonomian menuju Endemi Covid-19, KEMPPKF 2024 didesain agar APBD 2024 tetap mampu menjadi instrumen untuk pengendalian inflasi di daerah dan peningkatan belanja daerah pada produk dalam negeri serta melindungi masyarakat yang terdampak kedalam kelompok miskin ekstrim, untuk memperkuat ekonomi domestik, dan pemulihian kesehatan serta ekonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melakukan perubahan yaitu fokus belanja terhadap program prioritas untuk melakukan reformasi keuangan negara secara menyeluruh. Berdasarkan perspektif tersebut, Kebijakan Fiskal 2024 mengangkat tema: "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan*". Tema ini menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi, penyediaan aksesibilitas infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pelayanan publik kepada kelompok masyarakat yang tergolong miskin ekstrim.

Sejalan dengan arah kebijakan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD tahun 2024 sebagai berikut.

- 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia dengan Arah Kebijakan:
 1. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat
 2. Memberikan Bantuan Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi
 3. Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Tenaga Pendidik
 4. Menyediakan Perlengkapan Pendukung Pendidikan/Pembelajaran Siswa
 5. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN
 6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
 7. Menjadikan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rumah sakit rujukan

8. Meningkatkan Pembinaan mental dan Spiritual Masyarakat

2) Penyediaan Infrastruktur Dasar dengan Arah Kebijakan:

1. Membangun dan memelihara Jalan dan Jembatan
2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan
3. Meningkatkan Ketersediaan air bersih
4. Meningkatkan sanitasi yang layak
5. Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan SPAM/PDAM
6. Membangun infrastruktur pengendali banjir
7. Meningkatkan pengelolaan persampahan
8. meningkatkan Infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan

3) Peningkatan Produktivitas Ekonomi dengan Arah Kebijakan:

1. Menyediakan bibit pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan
3. Menyediakan pelatihan kerja kepada petani, nelayan dan peternak untuk peningkatan produksi
4. Meningkatkan kapasitas penyuluhan/pendamping pertanian dan perikanan
5. menyediakan pelayanan pendidikan vokasi
6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
7. Hilirisasi komoditas unggulan lokal
8. Penguatan usaha mikro, koperasi dan industri kreatif
9. Optimalisasi pengelolaan BUMDes
10. Penguatan sektor pariwisata

4) Harmonisasi Sosial Budaya dengan Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan edukasi dan persuasi untuk pencegahan konflik SARA
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan elemen masyarakat dalam menciptakan toleransi antar warga masyarakat
3. Melakukan identifikasi potensi serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatkan upaya mitigasi potensi dan menyiapkan sistem penanggulangan bencana dan kebakaran
5. Meningkatkan revitalisasi pengelolaan dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu

- 5) Peningkatan kualitas Tata kelola Pemerintahan dengan Arah Kebijakan:
 1. Meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
 3. Optimalisasi penerapan sistem pengawasan dan pengendalian internal perangkat daerah
 4. Meningkatkan cakupan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
 5. Meningkatkan sarana, mutu, kemudahan dan kepastian pelayanan publik
 6. Penyediaan sarana dan prasana perkantoran pemerintahan
- 6) Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan Arah Kebijakan:
 1. Peningkatan capasity building masyarakat miskin.
 2. Peningkatan layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada masyarakat miskin.

2.1.1.Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Faktor . utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang terserap pada lapangan kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

2.1.2 Pendapatan Regional Kabupaten Kepulauan Meranti

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Meranti digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menjelaskan kinerja suatu wilayah selama suatu periode waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit usaha (sektor-sektor ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita dan Pendapatan per Kapita adalah salah satu indikator ekonomi yang cukup penting, yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dapat diartikan sebagai rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk pada suatu daerah. Dan pendapatan perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh satu orang penduduk pada suatu daerah. Bila disajikan secara berkala, data tersebut akan dapat menunjukkan adanya perubahan kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan ke arah yang semakin membaik atau sebaliknya.

Kondisi PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku diperkirakan masih akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022, kecuali pada tahun 2020 dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2023-2024. Nilai PDRB atas harga berlaku secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp 18.394,55 miliar meningkat menjadi Rp 24.899,42 miliar tahun 2022 dan esimasi tahun 2023-2024 naik masing-masing menjadi Rp 26.134,92 miliar tahun 2023 dan Rp. 28.304,23 miliar tahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2019-2024 meningkat sebesar 6,31%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.1 berikut.

Tabel 2.1.2.1
Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

No.	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Tarif	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.561,90	7.191,11	8.302,55	9.046,51	9.616,04	10.322,17
B	Pertambangan dan Penggalian	3.407,93	2.499,74	3.433,13	5.272,25	5.284,85	5.937,49
C	Industri Pengolahan	4.531,01	4.738,17	5.414,28	6.092,70	6.360,52	6.931,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,30	9,00	9,29	10,68	11,12	11,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,74	0,77	0,77	0,77	0,80	0,81
F	Konstruksi	946,99	919,33	1.017,92	1.167,94	1.283,68	1.343,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.775,75	1.717,66	1.867,21	2.104,37	2.283,12	2.370,06
H	Transportasi dan Pergudangan	428,11	246,38	280,30	362,44	412,43	470,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,87	50,15	57,82	67,20	70,87	74,50
J	Informasi dan Komunikasi	104,76	113,61	122,21	132,89	141,37	150,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,01	55,19	59,31	67,13	72,48	76,29
L	Real Estate	80,93	82,88	87,05	95,58	102,24	106,33
M, N	Jasa Perusahaan	0,61	0,55	0,56	0,69	0,74	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	327,13	333,66	327,01	351,03	359,00	367,69
P	Jasa Pendidikan	42,44	44,10	45,84	48,09	50,00	51,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,03	14,15	15,68	16,20	17,49	18,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	55,05	49,74	52,19	62,94	68,16	69,44
PDRB		18.394,55	18.066,19	21.093,12	24.899,42	26.134,92	28.304,23

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2023

Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Meranti diestimasi tahun 2023-2024 diperkirakan masih tetap akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industry pengolahan, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022 dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2023 -2024. Nilai PDRB atas harga konstan secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp 12.631,55 miliar meningkat menjadi Rp 13.421,78 miliar tahun 2022 dan esimasi tahun 2023-2024 naik masing-masing menjadi Rp. 13.668,24 miliar tahun 2023 dan Rp. 13.932,92 miliar tahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2019-2024 meningkat sebesar 2,42%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.2.

Tabel 2.1.2.2
Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan/Realisasi					Estimasi/TARGET
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.828,97	5.011,72	5.213,48	5.312,71	5.426,40	5.558,81
B	Pertambangan dan Penggalian	1.517,50	1.612,50	1.516,58	1.587,41	1.589,44	1.591,66
C	Industri Pengolahan	3.809,23	3.823,78	3.905,70	3.953,72	4.014,65	4.068,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,73	5,04	5,21	5,79	6,03	6,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,64	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67
No	Sektor	Perkembangan/Realisasi					Estimasi/TARGET
No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	558,22	539,89	573,20	612,23	632,43	654,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.065,08	979,43	1.058,34	1.137,40	1.165,84	1.196,15
H	Transportasi dan Pergudangan	299,83	167,29	182,93	219,67	224,37	229,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,15	26,05	29,27	32,84	34,04	35,29
J	Informasi dan Komunikasi	86,73	94,15	100,84	107,57	113,03	119,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	36,48	37,16	38,33	40,28	41,44	42,67
L	Real Estat	57,41	58,45	60,71	64,41	66,38	68,48
M, N	Jasa Perusahaan	0,43	0,38	0,38	0,46	0,48	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	264,53	258,20	250,89	266,60	269,96	274,33
P	Jasa Pendidikan	25,08	25,51	26,32	27,22	28,07	29,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	8,96	9,81	9,94	10,50	11,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	39,15	34,72	36,14	42,88	44,53	46,69
Total PDRB		12.631,55	12.683,87	13.008,79	13.421,78	13.668,24	13.932,92

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023.

Laju pertumbuhan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus untuk dapat terus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus berupaya lebih intensif lagi terhadap ketiga sektor tersebut guna untuk mendorong investasi pada sektor non-migas serta menumbuh kembangkan sektor riil untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Perkembangan struktur ekonomi dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024. Tabel 2.1.2.3 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan masing-masing kontribusi dari setiap sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga berlaku di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor

terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi sektor pertanian dengan kekuatan berasal dari sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan dengan kontribusi sebesar 36,75% pada tahun 2024. Demikian halnya sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar kedua dan kontribusinya mengalami peningkatan dari 24,63% tahun 2019 diperkirakan meningkat menjadi 24,68% tahun 2024. Demikian halnya sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi dari 18,53% tahun 2019 dan diperkirakan akan peningkatan menjadi 21,14% tahun 2024. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan.

Sektor yang diperkirakan yang akan mengalami pertumbuhan kontribusi positif selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan administrasi pemerintahan walaupun tidak terlalu signifikan. Namun sektor lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan kontribusi selain jasa kesehatan dan jaminan social dan lainnya. Secara umum sektor-sektor tersebut tetap mengalami peningkatan nilai dari PDRB ADHB selama tahun 2023-2024. Perkembangan struktur ekonomi dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024. Tabel 2.1.2.3 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dengan masing-masing kontribusi dari setiap sektor di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga konstan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan sub sektor perkebunan dan sub perikanan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian, dimana kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 38,23% kemudian meningkat menjadi 39,58% tahun 2022, diestimasi kontribusi tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 39,70% tahun 2023 dan 39,90% tahun 2024.

Tabel 2.1.2.3
Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Persen)

No.	Sektor	Perkembangan		Realisasi		Estimasi	Target
		2019	2020	2021	2022		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,67	39,80	39,36	36,33	37,17	36,75
B	Pertambangan dan Penggalian	18,53	13,84	16,28	21,17	20,43	21,14
C	Industri Pengolahan	24,63	26,23	25,67	24,47	24,59	24,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	5,15	5,09	4,83	4,69	4,96	4,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	9,65	9,51	8,85	8,45	8,82	8,44
H	Transportasi dan Pergudangan	2,33	1,36	1,33	1,46	1,59	1,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
J	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,63	0,58	0,53	0,55	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	0,31	0,28	0,27	0,28	0,27
L	Real Estat	0,44	0,46	0,41	0,38	0,40	0,38
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,78	1,85	1,55	1,41	1,39	1,31
P	Jasa Pendidikan	0,23	0,24	0,22	0,19	0,19	0,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,28	0,25	0,25	0,26	0,25
Kontribusi PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

Sektor industri pengolahan merupakan yang telah memberikan kontributor terbesar kedua, namun kontribusinya mengalami penurunan dari 30,16% tahun 2019 menurun menjadi 29,46% tahun 2022 dan diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 29,37% tahun 2023 dan 29,20% tahun 2024. Sementara sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 dan diestimasi akan terus mengalami penurunan kontribusi dibawah 15% atau diestimasi sebesar 11,63% tahun 2023 dan 11,42% tahun 2024. Selanjutnya sektor lainnya yang diestimasi tahun 2023-2024 yang memberikan memberikan kontribusi dibawah 1% terhadap PDRB harga konstan adalah sektor pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, sampah dan limbah; akomodasi, makan dan minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; jasa perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Tabel 2.1.2.4
Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Persen)

No.	Sektor	Perkembangan Realisasi			Estimasi/Target	
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,23	39,51	40,08	39,58	39,70
B	Pertambangan dan Penggalian	12,01	12,71	11,66	11,83	11,63
C	Industri Pengolahan	30,16	30,15	30,02	29,46	29,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
F	Konstruksi	4,42	4,26	4,41	4,56	4,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	8,43	7,72	8,14	8,47	8,53
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	1,32	1,41	1,64	1,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,21	0,23	0,24	0,25
J	Informasi dan Komunikasi	0,69	0,74	0,78	0,80	0,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30
L	Real Estat	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	2,09	2,04	1,93	1,99	1,98
P	Jasa Pendidikan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,31	0,27	0,28	0,32	0,33
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

PDRB ADHB dan ADHK dapat digunakan sebagai indikator besaran nilai ekonomi suatu wilayah. Selain itu indikator tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian adalah melalui pertumbuhan ekonomi, baik itu di tingkat daerah maupun negara. Kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan apakah kinerja perekonomian di suatu negara atau daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses di mana sepanjang waktu terdapat peningkatan volume produksi suatu perekonomian untuk menghasilkan pendapatan dengan tingkat yang besar.

Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Kondisi menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertambahan produksi barang dan jasa

Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024 juga masih tetap sangat didominasi oleh sumberdaya alam.

**Tabel 2.1.2.5
Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kuantan Singingi	3,66 – 4,36
2	Indragiri Hulu	4,06 – 4,68
3	Indragiri Hilir	4,42 – 5,09
4	Pelalawan	3,66 – 4,54
5	Siak	1,39 – 1,84
6	Kampar	3,13 – 3,95
7	Rokan Hulu	4,62 – 4,97
8	Bengkalis	0,61 – 1,23
9	Rokan Hilir	1,50 – 2,03
10	Kep. Meranti	3,08 – 4,54
11	Pekanbaru	4,95 – 5,48
12	Dumai	4,21 – 4,89
13	RIAU	3,71 - 4,20

Sumber: Tim KEMDD Bappeda Provinsi Riau 2023

Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dari seluruh sektor lapangan usaha yang ada. Tingginya nilai produksi barang dan jasa dari sektor pertanian terutama didukung oleh perkembangan produksi barang dan jasa dari sub sektor perkebunan terutama komoditas kelapa sawit dan karet serta hasil perikanan budidaya.

Estimasi pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh Tim KEMD Bapedda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif dengan rentang antar 0,61-5,48%, kecuali Kabupaten Bengkalis yang hanya diestimasi berkisar antara 0,61-1,23%. Sementara itu estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 3,13%

dan angka optimis sebesar 3,95%. Walaupun estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 menjadi 3,13-3,95% kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 3,71-4,20%.

Sedangkan estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dan 2024 akan mengalami peningkatan menjadi masing-masing sebesar 2,87 dan 3,08%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, kecuali tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,90%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi Covid-19 dan hal ini terjadi diseluruh Indonesia, provinsi Riau dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya yang secara keseluruhan melibatkan mobilitas penduduk dalam kegiatannya. Pengurangan mobilitas penduduk tersebut menyebabkan rendahnya angka pertumbuhan ekonomi dan bahkan berada pada level negative dan alhamdulillah tahun 2021 sudah kembali tumbuh positif menjadi 3,45% dan tahun 2022 sekitar 2,51% dan diestimasi tahun 2023 akan tumbuh menjadi 2,87% dan 3,08% tahun 2024. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.6 berikut.

Tabel 2.1.2.6
Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kepulauan Meranti
Tahun 2019-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan					Estimasi/Target
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,19	5,83	5,62	2,14	2,44
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,94	-6,35	-2,97	-5,19	0,13	0,14
C	Industri Pengolahan	9,43	-0,94	4,20	4,09	1,54	1,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,36	8,55	5,18	5,93	4,15	4,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,45	0,69	4,93	1,48	1,03	1,03
F	Konstruksi	5,21	-3,29	3,53	2,00	3,30	3,50

No	Sektor	Perkembangan					Estimasi/Target
		2019	2020	2021	2022	2023	
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	5,21	-14,60	15,29	3,02	2,50	2,60
H	Transportasi dan Pergudangan	4,93	-8,10	5,74	1,80	2,14	2,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,57	-16,29	12,51	1,74	3,64	3,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,76	8,24	6,91	5,53	5,08	5,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	3,86	5,01	3,24	2,87	2,97
L	Real Estat	5,46	1,96	3,12	3,56	3,06	3,16
M, N	Jasa Perusahaan	6,53	-20,32	1,53	-1,83	3,42	3,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	4,84	-6,82	-0,58	0,09	1,26	1,62
P	Jasa Pendidikan	7,69	2,97	3,36	3,90	3,13	3,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,11	13,36	11,31	7,36	5,59	5,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,29	-21,68	4,33	0,33	3,85	4,85
PDRB		3,86	-0,90	3,45	2,51	2,187	3,08

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim KEMD Bappedalitbang Provinsi Riau 2023

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat peningkatan produksi barang dan jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Dengan demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna

dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Tabel 2.1.2.5 pendapatan per kapita atas harga dasar berlaku sangat fluktuatif selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024. Demikian halnya dengan pendapatan perkapita harga konstan. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa yang pertumbuhannya tidak stabil sementara jumlah penduduk senantiasa mengalami pertumbuhan positif. Jika dilihat PDRB ADHB per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 99,15 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 116,61 juta tahun 2022 dan diestimasi meningkat menjadi Rp. 120,37 juta tahun 2023 dan Rp. 128,17 juta tahun 2024. Sementara PDRB ADHK per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 68,09 juta kemudian menurun menjadi Rp. 62,86 juta tahun 2022 dan diestimasi naik menjadi Rp. 62,95 juta tahun 2023 dan Rp. 63,03 juta tahun 2024. Berikut Tabel 2.1.2.7 menyajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024.

**Tabel 2.1.2.7
Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019-2024**

Uraian	Satuan	Perkembangan Realisasi					Estimasi/Tarif	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ADHB Dengan Migas	(Rp. Milyar)	18.394,55	18.066,19	21.093,12	24.899,42	26.134,92	28.304,23	
ADHK Dengan Migas	(Rp. Milyar)	12.631,55	12.683,87	13.008,79	13.421,78	13.668,24	13.932,92	
ADHB Perkapita	(Rp. Juta)	99,15	87,65	100,70	116,61	120,37	128,17	
ADHK Perkapita	(Rp. Juta)	68,09	61,54	62,11	62,86	62,95	63,09	

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka Tahun 2017-2022, Olahan Tim Tahun 2023

2.1.3 Investasi Kabupaten Kepulauan Meranti

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini

tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dari setiap sektor ekonomi dalam kurun waktu tahun 2024. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, barang modal baru atau bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2024 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada semua sektor dari semua kalangan masyarakat, bukan investasi dari PMA dan PMDN yang tercatat pada instansi terkait. Hasil estimasi menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1,00% pada tahun 2024, maka dibutuhkan investasi baru senilai Rp. 11,67 triliun atau dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,08%, maka dibutuhkan investasi Rp. 35,94 triliun. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan masuknya investasi dari pihak swasta, pemerintah dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Banyaknya pertambahan jumlah produksi dan jasaakan menjadi pendorong peningkatan PDRB HK atau laju pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Oleh sangat diperlukan faktor pendukung meningkatnya investasi terutama kebijakan pemerintah baik pusat, Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu menjaga stabilitasi, mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan memicu masyarakat untuk meningkatkan kapsitas usahanya. Perkembangan investasi dan estimasi PMTB dan ICOR Kabupaten Kepulauan Meranti

berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019-2022 dan estimasi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.1.

Tabel 2.1.3.1
Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kepulauan Meranti
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Keterangan	Perkembangan Realisasi					Estimasi/TARGET
	2019	2020	2021	2022	2023	
Perubahan PDRB HK (ΔY)	325,28	52,32	324,92	412,99	246,46	264,68
PMTB AD-HK	2.711,68	2.679,45	2.775,94	2.925,98	2.995,87	3.088,42
ICOR	8,31	49,22	8,54	7,09	12,16	11,67

Sumber: Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standart hidup layak (*decent standard of living*). Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022 lihat Tabel 2.1.4.1.

Tabel 2.1.4.1
Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022

Indikator IPM	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Indek Pembangunan Manusian (IPM)	Indek	65,23	65,93	65,50	65,70	66,52	0,49
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,21	67,53	67,68	67,78	68,09	0,33
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	12,81	12,82	12,83	12,84	0,12
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,51	7,70	7,84	7,88	1,31
Pengeluaran Per Kapita	(Rp Juta/kapita)	7.978	8358	7.790	7.780	8.246	0,96

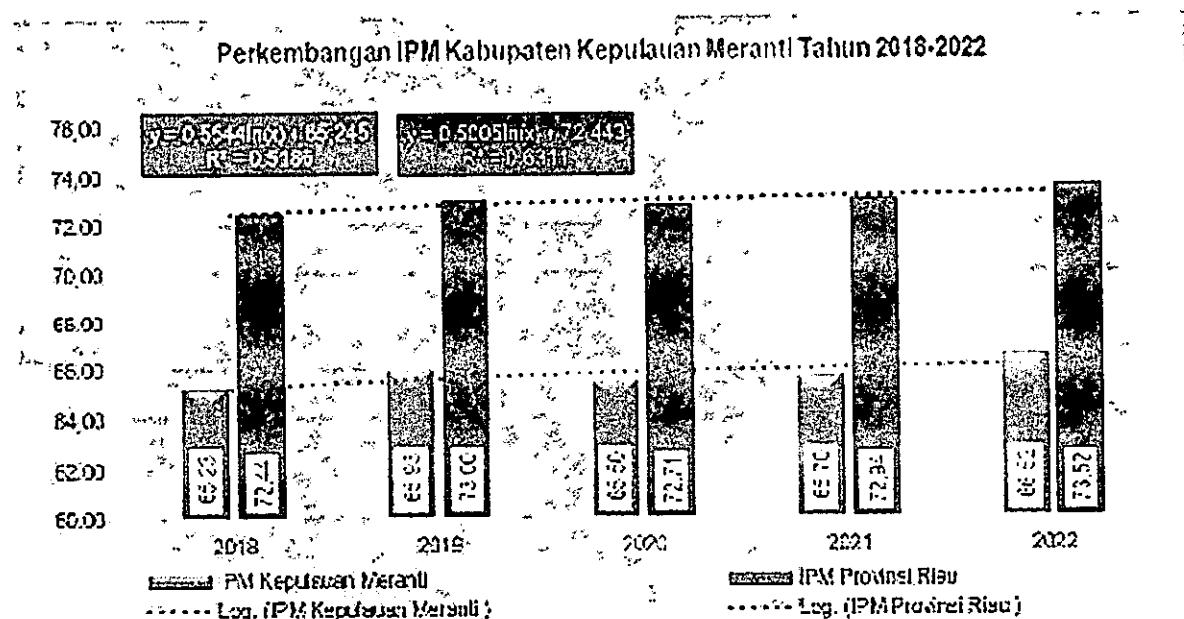
Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi, 2019-2023

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pertumbuhan RLS yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator IPM dengan indikator pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil.

Berdasarkan Gambar 2.28 tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2018-2022 adalah meningkat dari 65,23 pada tahun 2018 menjadi 66,52 pada tahun 2022, namun

masih dibawah IPM Provinsi Riau sebesar 73,52 pada tahun 2022. Akan tetapi percepatan peningkatan IPM Kabupaten Kepulauan Meranti lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi sebesar 0,554 dengan dibandingkan Provinsi Riau dengan konstanta sebesar 0,500. Namun demikian IPM Kabupaten Kepulauan Meranti masih masuk kategori IPM sedang dengan nilai ($60 \leq \text{IPM} < 70$) dan masih lebih rendah dibandingkan kategori IPM provinsi Riau sudah masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Perkembangan indek pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022 lihat Gambar 2.1.4.1 berikut.



**Gambar 2.2.1.1
Perkembangan IPM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022**
(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi, 2019-2023)

2.1.5 Koefisien *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output

adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formulasi penghitungan ICOR merupakan statistik yang menunjukkan kebutuhan perubahan stok capital untuk menaikkan satu unit output (Perubahan Kapital/Perubahan Output). Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan modal baru atau perubahan stock capital melainkan Investasi (I) yang ditanamkan oleh swasta maupun pemerintah sehingga ICOR dimodifikasi menjadi rasio investasi terhadap perubahan output, dimana faktor-faktor selain investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

**Tabel 2.1.5.1
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 – 2022**

Uraian	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perubahan PDRB HK (ΔY)	325,28	52,32	324,92	412,99	246,46	264,68
PMTB AD-HK	2.711,68	2.679,45	2.775,94	2.925,98	2.995,87	3.088,42
ICOR	8,31	49,22	8,54	7,09	12,16	11,67

Sumber: Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020.

Dari Tabel diatas menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Kepulauan Meranti yang menunjukkan selama tahun 2019-2022, besaran ICOR berada pada rentang 5 hingga 8. Namun pada tahun 2020 nilai ICOR mencapai 49,22 yang menunjukkan bahwa untuk mencapai penambahan output sebesar 1 miliar rupiah, dibutuhkan investasi sebesar 49,22 miliar rupiah. Namun, pada kenyataannya, pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi. Ada faktor-faktor lain diluar investasi seperti tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswataan yang juga berpengaruh.

Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output dengan perhitungan ICOR, maka peranan faktor-faktor lain selain investasi diasumsikan tetap (*ceterisparibus*).

2.1.6 Penduduk, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, dengan jumlah penduduk yang besar akan menjamin ketersediaan tenaga kerja. Namun rendahnya kualitas SDM dan penyebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Begitu juga dengan masalah-masalah lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kekurangan pangan, kesempatan kerja semakin menurun, masalah kerawanan sosial, bahkan kerusakan lingkungan dan wabah penyakit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 213.900 jiwa yang terdiri dari 110.300 jiwa penduduk laki-laki dan 103.400 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi dan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur menurut data registrasi penduduk dan proyeksi penduduk.

Tabel 2.1.6.1
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	Perumbuhan/Tahun(%)
Tebing Tinggi Barat	16.017	16.126	18.382	18.732	19.100	4,63
Tebing Tinggi	56.866	57.212	67.219	68.668	70.400	5,69
Tebing Tinggi Timur	11.884	11.962	13.293	13.511	13.800	3,89
Rangsang	18.765	18.892	20.123	20.372	20.700	2,51
Rangsang Pesisir	17.172	17.275	18.853	19.121	19.500	3,28
Rangsang Barat	17.645	17.745	19.488	19.772	20.100	3,38
Merbau	14.349	14.439	15.305	15.482	16.000	2,78
Pulau Merbau	15.155	15.248	15.824	15.972	16.200	1,69
Tasik Putri Puyu	16.519	16.617	17.629	17.830	18.100	2,33
Kepulauan Meranti	184.372	185.516	206.116	209.460	213.900	3,87

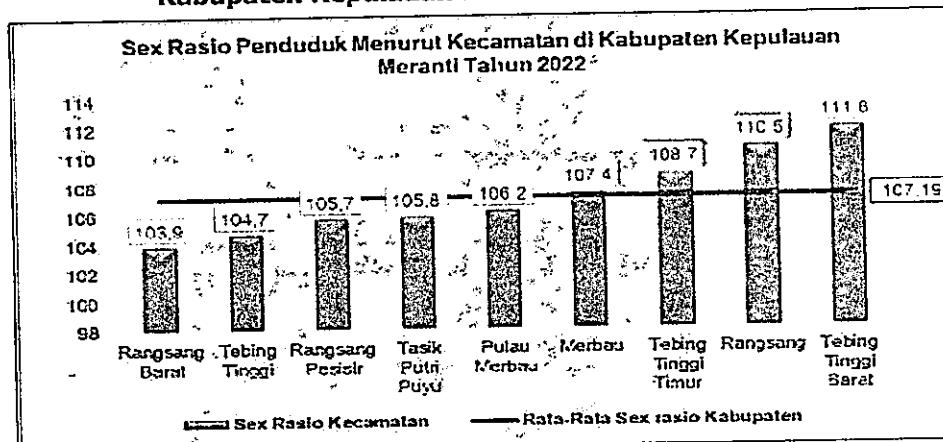
Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2019-2023

Tabel 2.1.6.2
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022

Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tebing Tinggi Barat	8,69	8,80	8,92	8,94	8,97	0,81
Tebing Tinggi	30,84	31,92	32,61	32,78	32,95	1,67
Tebing Tinggi Timur	6,45	6,47	6,45	6,45	6,45	0,02
Rangsang	10,18	9,89	9,76	9,73	9,69	-1,22
Rangsang Pesisir	9,31	9,27	9,15	9,13	9,11	-0,55
Rangsang Barat	9,57	9,65	9,45	9,44	9,42	-0,39
Merbau	7,78	7,56	7,43	7,39	7,36	-1,38
Pulau Merbau	8,22	7,83	7,68	7,63	7,57	-2,02
Tasik Putri Puyu	8,96	8,61	8,55	8,51	8,47	-1,38
Kepulauan Meranti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2018-2022

Tabel 2.1.6.3
Jumlah Penduduk Menurut Sex Ratio Penduduk
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022

Jika dilihat perkembangan sex ratio per kecamatan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1.6.3, maka terdapat kecamatan yang memiliki nilai sex rasio tertinggi pada tahun 2022 yakni Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebesar 111,80 yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Sebaliknya, Kecamatan Rangsang Barat memiliki sex ratio terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 103,90 yang artinya dari 100 penduduk wanita terdapat 104 penduduk laki-laki.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsumsi protein hewani dan nabati masih dibawah standard WHO dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Data sex rasio berguna untuk pengembangan perencanaan berwawasan gender terutama berkaitan dengan perimbangan

pembangunan antara laki-laki dengan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio juga sebagai dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Lembaga pemerintah, dunia usaha dan tenaga profesional. Sex rasio penduduk dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.6.4 berikut :

**Tabel 2.1.6.4
Perkembangan Sex Ratio Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2018 – 2022**

Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tebing Tinggi Barat	111,56	109,12	110,15	110,95	111,80	0,06
Tebing Tinggi	103,96	105,53	105,60	105,14	104,70	0,18
Tebing Tinggi Timur	110,41	107,07	107,83	108,25	108,70	-0,38
Rangsang	108,45	109,56	109,68	110,09	110,50	0,47
Rangsang Pesisir	105,65	107,52	106,13	105,89	105,70	0,02
Rangsang Barat	100,22	106,58	105,57	104,72	103,90	0,95
Merbau	108,44	107,10	107,08	107,23	107,40	-0,24
Pulau Merbau	101,99	107,11	107,20	106,68	106,20	1,04
Tasik Putri Puyu	102,86	107,64	106,77	106,29	105,80	0,73
Kepulauan Meranti	105,33	107,04	106,91	107,25	107,19	0,44

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2029-2023

Dependency Ratio dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau yang sedang berkembang dengan cara membandingkan antara kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 dan 64 tahun ke atas).

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Selama periode 2018-2022, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 4,62% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 2,45% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -

2,00% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif.

Nilai *dependency ratio* Kabupaten Kepulauan Meranti masuk kategori sangat tinggi selama periode 2018-2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.6.5 berikut :

Tabel 2.1.6.5
Perkembangan Ratio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2018 – 2022

Struktur Umur	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Umur Produktif (15-64 tahun)	Jiwa	123.482	139.533	142.478	144.686	147.300	4,62
Umur Non Produktif (0-14 & 6575+)	Jiwa	60.890	68.826	63.638	64.774	66.400	2,45
Nilai Dependency Ratio	Angka	49	49	45	45	45	-2,00

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sustainable Development Goals (SDG's) dengan 17 tujuan utama dan salah satu tujuan utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Kemajuan yang dicapai Kabupaten Kapulauan Meranti dalam penanggulangan kemiskinan selaras dengan capaian SDG's 2022 dengan pencapaian sebesar 23,84%. Meski pemerintah Kabupaten Kapulauan Meranti telah berhasil menurunkan kemiskinan, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan

persentase penduduk miskin, tetapi bagaimana mengeluarkan penduduk miskin tersebut dari kelompok penduduk miskin.

Walaupun mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan tetapi masih jauh diatas tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Riau sebanyak empat kali lebih tinggi dan masih yang tertinggi di semua indikator kemiskinan dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Oleh karena itu program pembangunan yang lebih fokus dan lokus terutama pada perbaikan variabel determinan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar serta penyediaan pangan yang berkualitas harus menjadi perhatian utama.

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode 2018-2022 terus mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar -2,96%. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebanyak 51.170 jiwa kemudian berkurang menjadi 45.250 jiwa pada tahun 2022 atau berkurang sebanyak 5.920 ribu jiwa. Kemampuan untuk mengurangkan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kecepatan dalam strategi penurunan jumlah penduduk miskin secara relatif berpacu dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah penduduk miskin memerlukan rencana yang tepat dan akurat terutama terkait dengan data kependudukan. Berikut disajikan perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018-2022.

**Tabel 2.1.6.6
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2018 – 2022**

Indikator Kemiskinan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	51,17	49,89	47,10	48,50	45,25	-2,96
Persentase Penduduk Miskin	%	27,79	26,93	25,28	25,68	23,84	-3,70
Indek Kedalaman Kemiskinan	%	5,22	5,97	4,32	4,46	3,54	-7,66
Indek Keparahan Kemiskinan	%	1,37	1,93	1,11	1,22	0,87	-5,10
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita	462.535	483.377	520.955	542.599	568.639	5,31

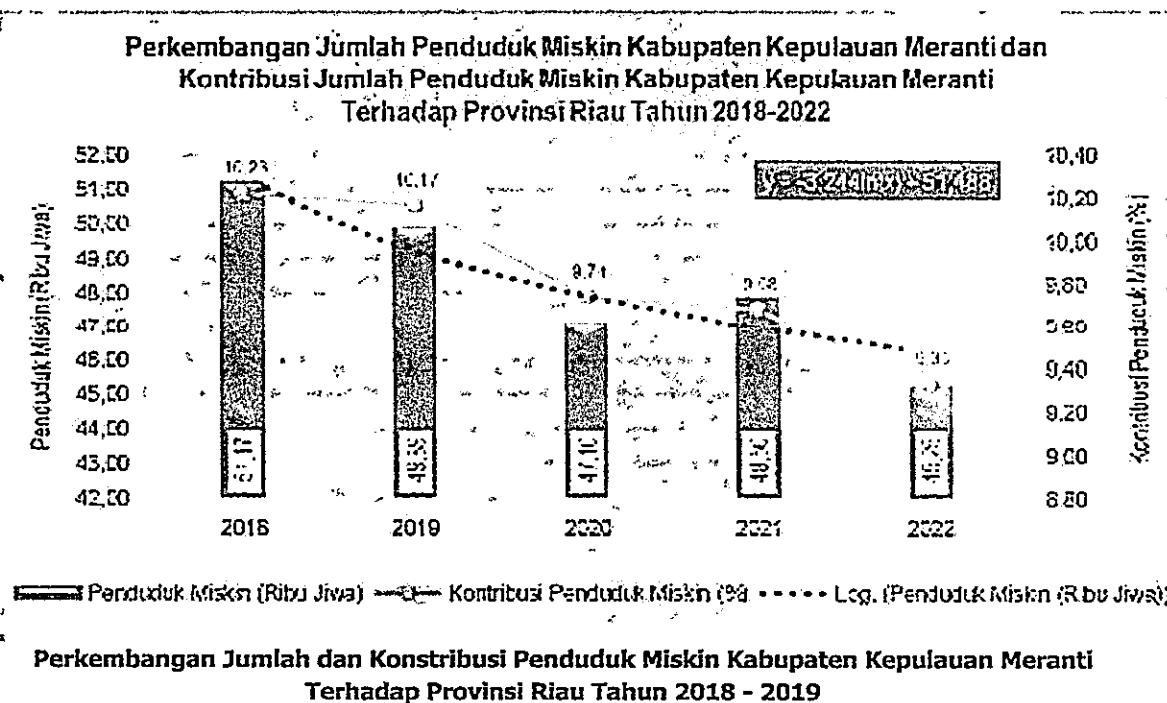
Sumber: BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Berita Resmi, 2019-2023

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 sebanyak 51.170 jiwa atau 10,23% dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Kemudian kontribusinya berkurang menjadi 9,33% terhadap penduduk miskin Provinsi Riau pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin terus mengalami

penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan nilai koefisien regresi sebesar -3,244. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan sebesar 27,79% dan turun menjadi 23,84% pada tahun 2022. Selama periode 2018-2022, tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar 3,70% per tahun. Namun demikian tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 6,78%.

Jika dilihat dari tren perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode tersebut lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar -2,233 sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau hanya sebesar -0,317 artinya penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih cepat pengurangannya lebih kurang sebanyak sepuluh kali lipat berbanding Provinsi Riau selama periode 2018-2022. Kondisi tersebut jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.6.1 berikut.

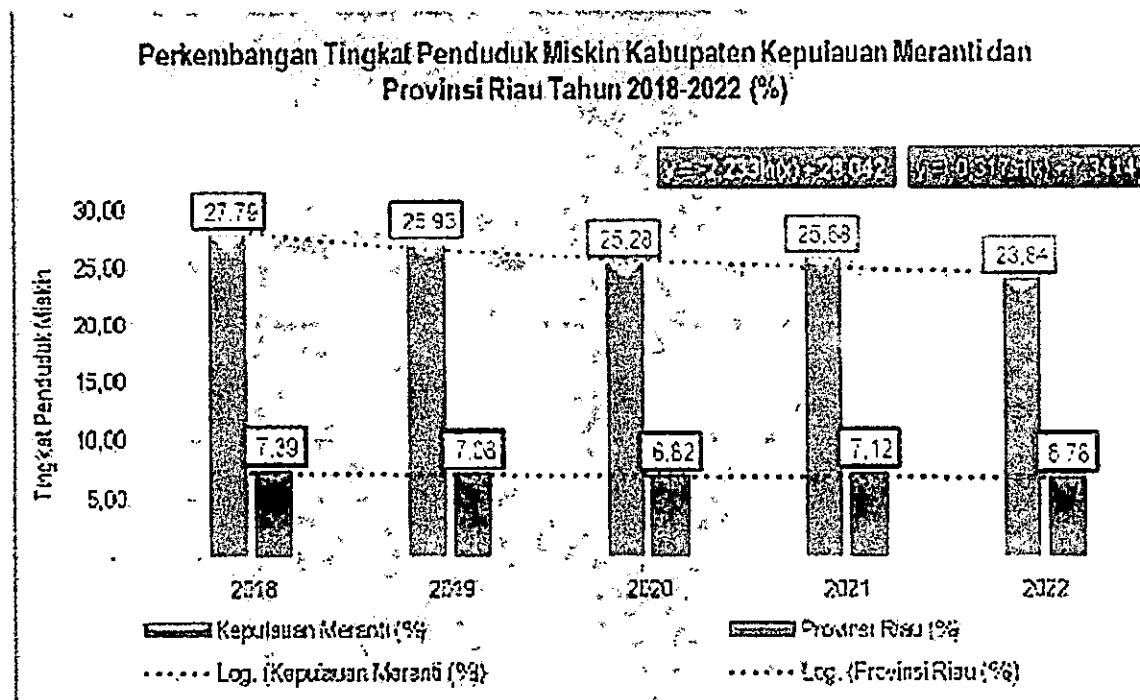
Gambar 2.1.6.1



Upaya yang lebih kuat itu ialah dengan mengusahakan penajaman penanggulangan kemiskinan melalui penargetan pengurangan angka kemiskinan di wilayah kecamatan prioritas atau kantong kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini penting untuk memastikan basis wilayah prioritas pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan harus berjalan efektif dan efisien melalui kordinasi sektoral terutama pengembangan perekonomian masyarakat pada semua sektor dan sub sektor yang banyak digeluti atau sebagai penopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tiga strategi utama yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain strategi peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan, jelasnya lihat pada Gambar 2.1.6.2.

Gambar 2.1.6.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2018 - 2022



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan

perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Perangkat Daerah (PD). Perkembangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.2.1.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain

pendanaan melalui APBN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP, RPJMD, dan RKPD Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 2.2.1
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2022 (Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	REALISASI					Perumbahan/Tahun (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1	1.065.043.393.579,32	1.179.280.568.095,59	1.318.592.842.417,00	1.039.668.744.227,68	1.065.125.815.255,57	0,96
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.	68.006.356.887,21	79.075.541.783,96	68.885.900.802,09	96.649.421.816,55	93.053.901.444,57	10,00
3	Hasil Pajak Daerah	5.1.1.1.	13.055.122.223,00	13.645.282.112,61	12.025.122.230,60	13.557.805.030,43	16.115.103.376,01	6,06
4	Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.	1.175.330.646,00	1.555.778.930,00	1.664.587.875,00	1.147.878.100,00	1.342.724.150,00	6,32
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.3.	15.477.494.290,00	14.204.016.698,00	10.322.091.276,00	15.178.104.057,00	12.451.599.353,00	-1,62
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.4.	38.298.409.728,21	49.670.464.043,35	44.874.099.420,49	66.765.634.629,12	63.154.474.565,56	15,85
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.	975.871.356.692,11	1.071.955.694.728,63	1.009.836.747.046,87	912.648.207.793,13	972.061.913.811,00	0,23
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.2.1.	781.602.610.877,00	884.353.281.057,00	823.023.644.635,00	727.746.293.201,00	792.912.380.359,00	0,90
9	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1.	57.904.427.427,00	42.255.381.209,00	40.320.168.000,00	70.540.777.453,00	60.582.880.058,00	7,31
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.2.1.2.	161.515.867.404,00	220.026.265.090,00	159.471.229.978,00	97.542.854.189,00	160.388.010.598,00	8,57
11	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3.	403.426.873.000,00	427.224.133.000,00	409.248.293.000,00	406.358.050.000,00	405.408.611.288,00	0,19
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4.	158.755.443.046,00	194.847.501.758,00	213.983.953.657,00	153.304.611.559,00	166.532.878.415,00	3,21
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.1.2.2.	119.300.801.000,00	118.692.504.000,00	115.410.805.000,00	106.653.320.000,00	88.309.772.000,00	-7,02
14	Dana Otonomi Khusus	5.1.2.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Dana Penyeuaian	5.1.2.2.2.	119.300.801.000,00	118.692.504.000,00	115.410.805.000,00	0,00	0,00	-
16	Dana Intensif Daerah		0,00	0,00	0,00	9.712.602.000,00	3.070.579.000,00	-
17	Dana Kelembagaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	96.940.718.000,00	85.239.193.000,00	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.2.3.	63.593.042.955,11	66.473.909.671,63	58.227.297.411,87	78.248.594.592,13	90.839.761.452,00	10,65
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.1.	63.593.042.955,11	66.473.909.671,63	58.227.297.411,87	72.258.662.592,13	87.309.761.452,00	9,26
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

22	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	5.989.932.000,00	3.530.000.000,00	-
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3.	21.165.680.000,00	28.249.331.583,00	31.693.761.184,00	30.371.114.618,00	0,00
24	Pendapatan Hibah	5.1.3.1.	21.165.680.000,00	28.249.331.583,00	31.693.761.184,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Dana Darurat	5.1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Lainnya	5.1.3.3.	0,00	0,00	0,00	30.371.114.618,00	0,00

Sumber: BAPENDA dan BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

2.2.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspon dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) sebesar 4,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat ke level 2,8 persen. Tingkat inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter, semakin terbatasnya ruang kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter), meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ekonomi global. Berdasarkan data Bloomberg bulan April 2023, probabilitas resesi teknikal di banyak negara maju masih tinggi, seperti di Inggris (65 persen), AS (65 persen), dan Eropa (45 persen). Kondisi ini menurunkan optimisme dan menciptakan sentimen negatif bagi perekonomian. Seiring dengan pelemahan global, berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor riil), kebijakan moneter serta situasi dan kondisi umum. Disamping itu juga perkembangan krisis ekonomi global juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Secara total, PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2021 meningkat sebesar 16,75% yakni dari 18.066,19 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 21.093,09 milliar rupiah pada tahun 2021. Jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, di tahun 2021 terjadi peningkatan nilai PDRB ADHK sebesar 2,56% dibandingkan tahun 2020.

Sedangkan untuk PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 Atas Dasar Harga Konstan sebesar 12,68 triliun rupiah. Secara total, PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2020 menurun sebesar 1,79% yakni dari 18.394,55 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 18.066,19 milliar rupiah pada tahun 2020. Jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai PDRB ADHK sebesar 0,43% dibandingkan tahun 2019.

Selama periode 2017-2021, perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti rata-rata tumbuh sebesar 2,72 persen, yakni sebesar 3,29% (2017); 4,03% (2018); 2,64% (2019); 0,43% (2020) dan 2,56% (2021). Artinya, perekonomian Kepulauan Meranti meningkat setiap tahunnya. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 39,36% dari total PDRB di Tahun 2021. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang menyumbang sebesar 34,60% dari total PDRB pada tahun 2021.

Pada periode tahun 2017–2021, PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 16.725,88 miliar rupiah (2017) menjadi 21.093,09 miliar

rupiah (2021). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 2.2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Meranti (Miliar), Tahun 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	(Miliar Rupiah)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,332.78	6,741.47	7.172,26	7.192,52	7.417,92	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	126.32	136.50	153,34	158,18	150,17	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	524.94	568.79	644,13	658,14	671,23	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,878.15	4,240.31	4.600,31	4.582,76	4.957,36	
5. Perubahan Inventori	40.83	46.62	40,68	74,19	14,50	
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	5,822.86	6,429.95	5.783,83	5.400,39	7.881,92	
TOTAL PDRB	16,725.88	18,163.64	18,394.55	18,066.19	21.093,09	

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Pengeluaran 2017-2021.

Berdasarkan data pada tersebut dapat dilihat bahwa PDRB atas harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dimana terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir secara umum seluruh komponen menunjukkan tren positif kecuali komponen perubahan inventori dan juga net ekspor barang dan jasa yang cenderung fluktuatif.

Tabel 2.2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Meranti (Juta Rupiah) Tahun 2018 - 2020

Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2020	2019	2018
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.204.309,48	7185805,45	6741470,59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	158.183,92	153337,59	136498,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	658.140,27	644131,42	568787,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.582.762,47	4600306,64	4240312,2
5. Perubahan Inventori	27.096,61	43310,33	46623,97
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	5.435.694,43	5767653,86	6429947,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.068.207,18	18.396.564,29	18.165.658,55

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Pengeluaran 2016-2020.

2.2.2. Perkiraan PDRB, PDRB PerKapita dan Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, DRB per-kapita Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2016-2019 namun pada tahun 2020 terjadi penurunan seiring dengan penurunan PDRB atas dasar harga berlaku dan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 96,80 juta rupiah. Artinya, secara rata-rata, penduduk Kepulauan Meranti mampu menciptakan nilai tambah sebesar 96,80 juta rupiah pada tahun 2020. Menurun dibandingkan PDRB per kapita tahun sebelumnya yang mencapai 99,15 juta rupiah.

Tabel 2.2.2.1
PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti (Juta Rupiah),
Tahun 2017 - 2021

PDRB	PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Atas Dasar Harga Berlaku	91,25	98,52	99,15	89,24	100,70
Atas Dasar Harga Konstan 2010	64,53	66,74	68,08	61,54	62,11

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.
 * 2020 : Angka Sementara * 2021 : Angka Sementara

Tabel 2.2.2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	16,044.10	16,725.88	18,163.64	18,394.55	18,066.19
- ADHK 2010	11,451.08	11,827.31	12,304.37	12,629.43	12,683.87
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	88.08	91.25	98.52	99.15	96.80
- ADHK 2010	62.87	64.53	66.74	68.08	67.96
Pertumbuhan PDRB					
Perkapita ADHK 2010	3.20	3.29	4.03	2.64	0.43
Jumlah penduduk (orang)	182,152	183,297	184,372	185,516	186,629

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Pengeluaran 2017-2021.

Untuk pertumbuhan per kapita secara riil selama lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 yang hanya mencapai 0,43 persen. Di sisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara riil tetapi juga secara kualitas. Tentu akan lebih baik lagi jika pertumbuhan PDRB per kapita diikuti juga dengan peningkatan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah.

Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 2.2.2.3
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Meranti, 2017 - 2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	(Miliar Rupiah)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,823.18	6,332.78	6,741.47	7,185.81	7,204.31	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	120.14	126.32	136.50	153.34	158.18	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	493.55	524.94	568.79	644.13	658.14	
JUMLAH	6.436,87	16.725,88	18.163,64	18.394,55	8.020,63	
PDRB (ADBH) (Miliar Rp)	16.044,10	16.725,88	18.163,64	18.394,55	18.066,19	
Proporsi (%)	40.12	41.76	41.00	43.40	44.40	

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Pengeluaran 2017-2021.

2.2.3. Perkiraan Pertumbuhan Penduduk dan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode 2017-2021 mengalami pertambahan dari 183.297 jiwa pada tahun 2017 menjadi 209.460 jiwa pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 3,48 % per tahun.

Sementara itu jika dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan maka jumlah penduduk yang paling banyak pada selama tahun 2017-2021 adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 5,21% per tahun atau bertambah dari 56,540 jiwa pada tahun 2017 menjadi 68.668 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 11,811 jiwa pada tahun 2017 menjadi 13,511 jiwa pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51% per tahun. Perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk pada wilayah ini tidak terlepas dari tersedianya potensi pengembangan wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin membaik.

Perkembangan jumlah penduduk miskin kabupaten Kepulauan Meranti selama periode 2012-2021 terus mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,94%. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 63.850 jiwa kemudian berkurang menjadi 48.500 jiwa pada tahun 2021 atau berkurang sebanyak 15.350 jiwa. Kemampuan untuk mengurangkan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kecepatan dalam strategi penurunan jumlah penduduk miskin secara relatif berpacu dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah penduduk miskin memerlukan rencana yang tepat dan akurat terutama terkait dengan data kependudukan.

Mencermati jumlah penduduk miskin pada umumnya masih terkonsentrasi di daerah perdesaan, hal ini disebabkan masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri sebagai penggerak perekonomian pedesaan maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus melakukan upaya terhadap sektor tersebut guna untuk mendorong investasi dan menumbuhkembangkan sektor non-migas untuk meningkatkan peranan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi pedesaaan sehingga diharapkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di pedesaan tahun-tahun berikutnya akan semakin berkurang jumlahnya.

**Tabel 2.2.3.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk
Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 – 2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	397.937	61,07	61,07
2015	405.535	61,64	34,08
2016	427.938	56,18	30,89
2017	445.025	53,05	28,99
2018	462.535	51,17	27,79
2019	483.377	49,89	26,93
2020	520.955	47,10	25,28
2021	542.599	48,50	25,68

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022

Tabel 2.2.3.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan di Kepulauan Meranti Tahun 2014 – 2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2014	6,59	1,93
2015	6,63	2,03
2016	7,17	2,42
2017	6,51	2,20
2018	5,22	1,37
2019	5,97	1,93
2020	4,32	1,11
2021	4,46	1,22

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022

2.2.4. Perkiraan Pertumbuhan Investasi

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa untuk konsumsi akhir, PDRB juga digunakan untuk pembentukan modal bruto (PMTB) atau juga disebut investasi fisik yang sifatnya lebih produktif. Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti yg luas, investasi selalu dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau kepentingan kapasitas produksi pada masa yang akan datang. Dilihat dari sisi kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, investasi industri pada tahun 2021 49,64 miliar rupiah, investasi industri terbesar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebesar 17,56 miliar rupiah atau sebesar 35,38 % dan yang paling terkecil di Kecamatan Rangsang Barat sebesar 652,1 juta rupiah atau 1,31 %. Berdasarkan

data dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa untuk konsumsi akhir, PDRB juga digunakan untuk pembentukan modal bruto (PMTB) atau juga disebut investasi fisik yang sifatnya lebih produktif. Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti yang luas, investasi selalu dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau kepentingan kapasitas produksi pada masa yang akan datang.

**Tabel 2.2.4.1
Nilai Investasi Industri Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2021**

Kecamatan	Investasi	
	Nilai (Rp,000)	Persentase
Tebing Tinggi Barat	17.564.270	35,38
Tebing Tinggi	11.930.450	24,03
Tebing Tinggi Timur	5.606.130	11,29
Rangsang	4.736.990	9,54
Rangsang Pesisir	2.889.525	5,84
Rangsang Barat	652.100	1,31
Merbau	1.009.000	2,03
Pulau Merbau	2.972.525	5,99
Tasik Putri Puyu	2.277.670	4,59
Kepulauan Meranti	49.648.660	100

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022

Tabel 2.2.4.2
Jumlah Pekerja Industri Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2019 – 2021

Kecamatan	Jumlah Pekerja		
	2019	2020	2021
Tebing Tinggi Barat	1.318	1.318	1.357
Tebing Tinggi	1.340	1.340	1.329
Tebing Tinggi Timur	944	944	949
Rangsang	925	925	929
Rangsang Pesisir	364	364	364
Rangsang Barat	338	338	338
Merbau	810	810	413
Pulau Merbau	408	408	815
Tasik Putri Puyu	826	826	826
Kepulauan Meranti	7.237	7.237	7.230

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan perkiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN Tahun 2024 dan asumsi makro APBD Provinsi Riau Tahun 2024. Sejalan dengan tema dari Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran Fiskal (KEM PPKF) yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka ditetapkan proyeksi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dari sector Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2024 sebesar 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp14.800 hingga Rp15.400 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 6,49 hingga 6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 hingga 85 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 597.000 hingga 652.000 barel per hari, serta lifting gas bumi 999.000 hingga 1.054 juta barel setara minyak per hari. Sementara, target pembangunan tahun 2024 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun 3,6 hingga 4,3 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31.

Tabel 3.1.1
Gambaran Ekonomi Makro Nasional

Indikator Ekonomi Makro	2021	2022	2023	2024
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,0 – 5,5	5,3 – 5,9	5,2
2. Laju Inflasi (%)	3	3	2 – 4	2,8
3. Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,0	5,5 – 6,3	5,3 – 6	5,0 – 5,7
4. Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	8,5 – 9,0	7,5 – 8,5	6,5 – 7,5

Sumber : Kemenkeu RI

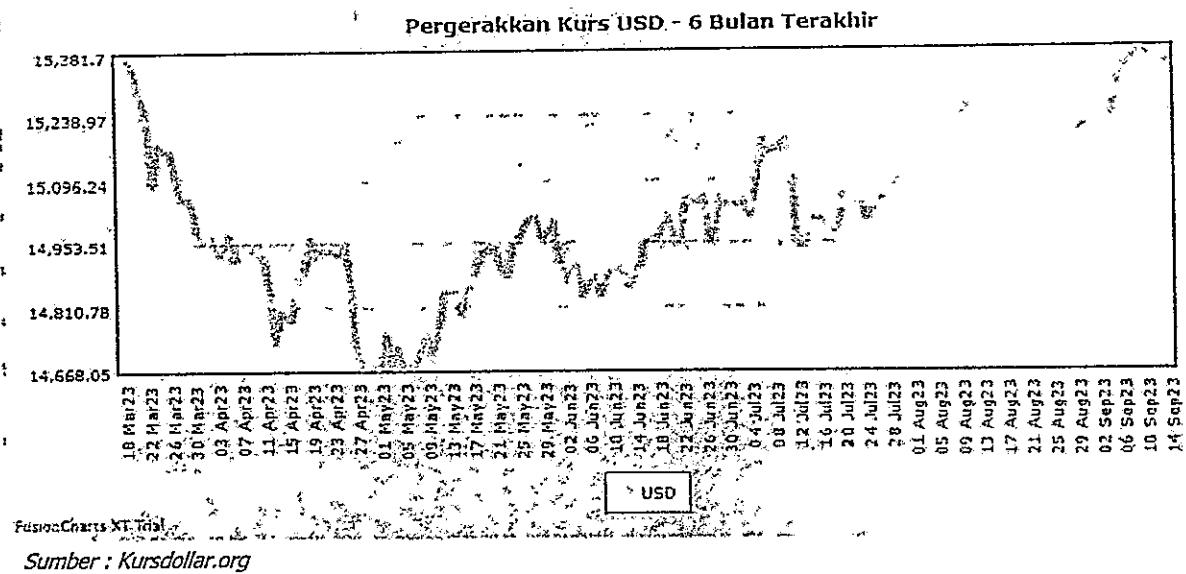
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2024 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Target tersebut ditetapkan untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta dinamika dalam negeri maupun global. diantaranya perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Pada tahun 2024 inflasi diperkirakan terkendali pada kisaran 1,5 persen (yoy), berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,8 persen (yoy). Dari sisi domestik, penguatan nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2023 ditopang oleh berbagai bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar valas sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, serta didukung implementasi program PEN. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah dikontribusikan oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Nilai tukar Rupiah pada triwulan II 2023 berada dalam tren menguat, dimana sampai 30 Juni 2023 menguat 0,63% secara *point to point* dibandingkan dengan level akhir triwulan I 2023, didorong kuatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio. Secara *year to date*, nilai tukar Rupiah juga menguat 4,48% dari level akhir Desember 2023. Pada 30 Juni 2023 nilai tukar Rupiah tercatat berada pada posisi Rp15.037/US dollar.

Tabel. 3.1.2
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US\$ (Rp/US\$)



Respons kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh BI dengan cara mempertahankan suku bunga acuan BI, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 24–25 Mei 2023. Keputusan ini sejalan dengan perlunya Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama *imported inflation*, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, melanjutkan *twist operation* melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalamannya pada respons suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran), melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) peningkatan intensitas kampanye bersama industri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS); (ii) pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok, mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui

program *Championship* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023, memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen pada tahun 2024. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,8 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp15.000,00 per US Dollar.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2024 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2024 diharapkan turun, masing-masing menjadi 6,5–7,5 persen. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

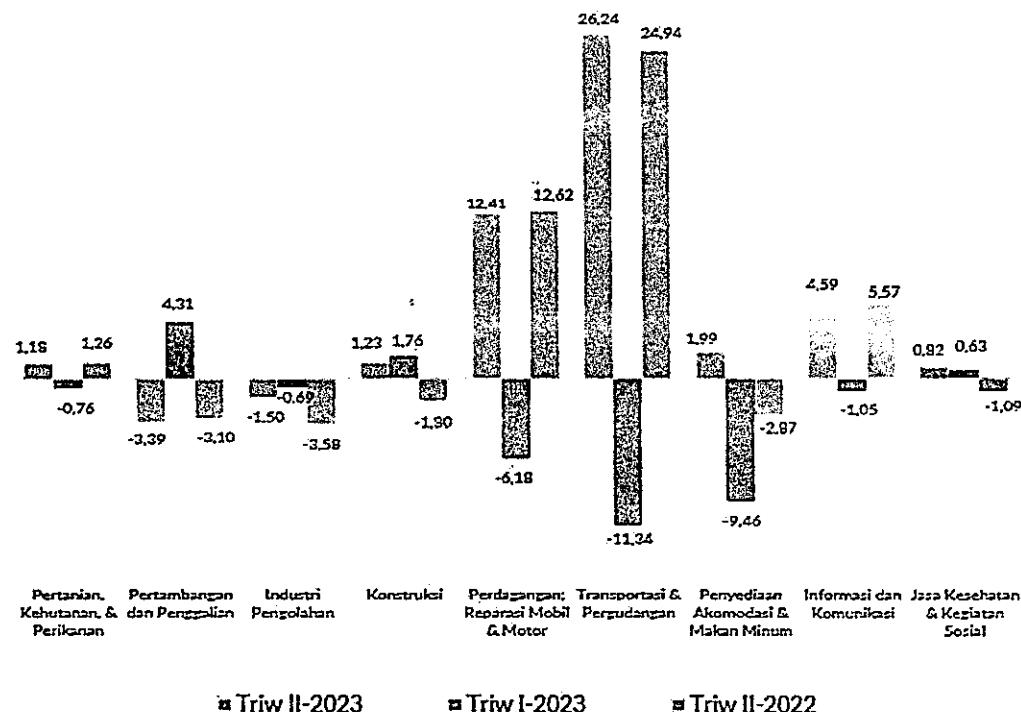
Tabel. 3.1.3
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

INDIKATOR	KEMIPPKF 2024
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,2
Inflasi (% ,yoy)	2,8
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000
ICP (US\$/Barrel)	82
Lifting Minyak (rbph)	635
Lifting Gas (rbsmph)	1.033
Tingkat Pengangguran (%)	5,0 - 5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,1
Gini Rasio (Indeks)	0,374 -0,377
IPM (Indeks)	73,99 - 74,02
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107- 110

Sumber : Kemenkeu RI

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tumbuh positif dan cukup signifikan pada triwulan II 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp. 244,74 triliun. Ekonomi Riau Triwulan II 2023 Terhadap Triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan 4,88 % (*y-on-y*). Penyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tumbuh positif dan cukup signifikan diantaranya adalah Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 12,19%. Dari sisi pengeluaran, komponen Eksport Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,72%.

Tabel 3.1.4
Pertumbuhan Tertinggi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2022 – Triwulan II 2023



Sumber : BPS Provinsi Riau

Tabel. 3.1.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Trw.II 2022	Trw.I 2023	Trw.II 2023	Trw.II 2022	Trw.I 2023	Trw.II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	59,85	63,25	62,89	35,29	35,96	36,39
B. Pertambangan dan Penggalian	60,85	53,32	47,63	19,39	20,59	19,89
C. Industri Pengolahan	64,36	70,92	66,07	40,36	43,62	42,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,19	0,20	0,10	0,10	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F. Konstruksi	20,54	23,31	23,53	11,07	11,43	11,57
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,61	24,69	27,84	13,85	13,13	14,76
H. Transportasi dan Pergudangan	1,96	1,79	2,28	1,08	0,91	1,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,08	1,15	1,18	0,58	0,60	0,61
J. Informasi dan Komunikasi	1,87	1,93	2,03	1,52	1,55	1,62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,07	2,45	2,36	1,19	1,38	1,34
L. Real Estat	1,92	1,97	2,04	1,23	1,23	1,27
M,N. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	2,90	3,64	2,34	2,07	2,52
P. Jasa Pendidikan	1,20	1,13	1,25	0,69	0,64	0,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,60	0,61	0,32	0,35	0,35
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,02	1,15	1,15	0,62	0,69	0,69
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	246,38	250,77	244,74	129,65	134,29	135,99
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa Migas	193,29	207,93	205,51	113,31	117,70	119,52

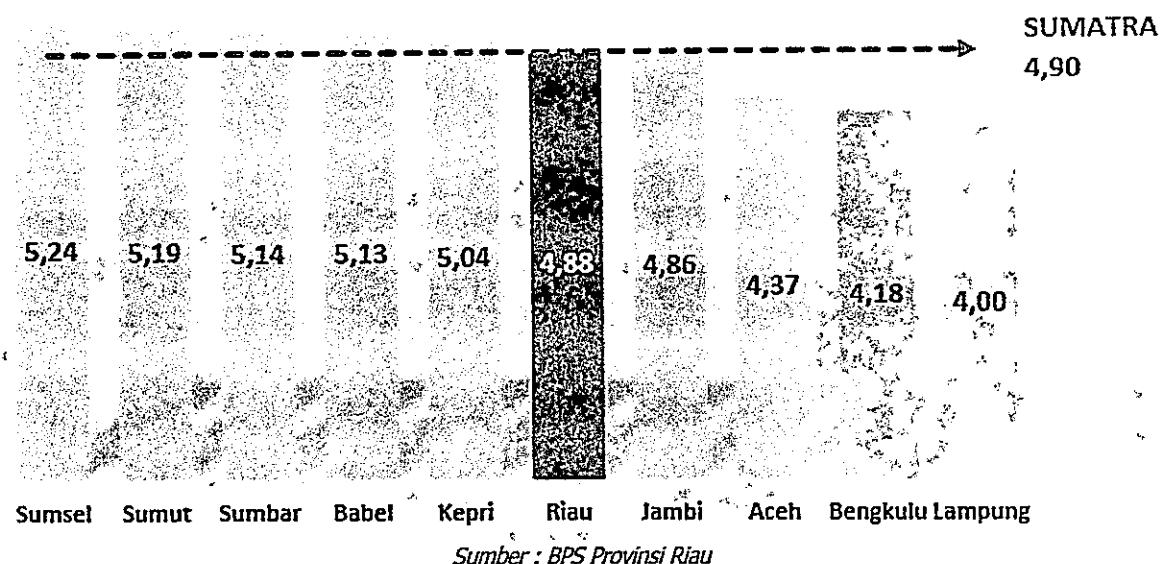
Sumber : BPS Provinsi Riau

Tabel. 3.1.6
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	(1)	Trw.II-2023 terhadap Trw.I-2023 (q-to-q)	Trw.II-2023 terhadap Trw.I-2022 (y-on-y)	Trw.I-2023 terhadap 2022 (G-to-G)	Sumber Pertumbuhan Trw.II-2023 (%JPN)
		(2)	(3)	(4)	
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,18	3,12	3,16	0,85	
B. Pertambangan dan Penggalian	-3,39	2,58	2,74	0,39	
C. Industri Pengolahan	-1,50	6,45	5,31	2,01	
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,05	8,64	6,47	0,01	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	6,44	5,68	0,00	
F. Konstruksi	1,23	4,60	3,02	0,39	
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,41	6,58	6,67	0,70	
H. Transportasi dan Pergudangan	26,24	6,36	5,88	0,05	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	6,06	3,50	0,03	
J. Informasi dan Komunikasi	4,59	6,85	7,34	0,08	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,96	12,19	6,61	0,11	
L. Real Estat	3,03	3,03	3,81	0,03	
M,N. Jasa Perusahaan	1,40	10,63	10,41	0,00	
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,76	7,89	8,78	0,14	
P. Jasa Pendidikan	10,89	3,14	4,29	0,02	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	9,81	8,76	0,02	
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,42	10,87	10,86	0,05	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,26	4,88	4,38	4,88	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa Migas	1,55	5,48	4,70	4,79	

Sumber : BPS Provinsi Riau

Tabel. 3.1.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi – Provinsi di Pulau Sumatra Triwulan II – 2023



Sumber : BPS Provinsi Riau

3.1.1 Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, dengan kata lain dalam inflasi terjadi proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan suatu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas pada berbagai sektor ekonomi. Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan interaksi antar sisi permintaan dan sisi penawaran. Namun pada kenyataannya inflasi tidak hanya dalam arus lalu lintas barang dan jasa tapi juga terkait prilaku sektor keuangan bahkan lebih luas lagi inflasi terkait dengan kebijakan Pemerintah bahkan lebih luas lagi inflasi terkait dengan prilaku sektor keuangan.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro maupun mikro, baik fiskal maupun moneter.

Berdasarkan analisis korelasi data belanja pengendalian inflasi per kapita dan tingkat inflasi di tahun 2022, semakin tinggi belanja pengendalian inflasi per kapita di daerah berhubungan dengan tingkat inflasi yang relatif lebih terkendali. Belanja inflasi per kapita per daerah ditentukan dengan

menggunakan pendekatan penandaan anggaran dari 213 subkegiatan pada APBD yang tersebar di 24 program. Subkegiatan yang dilakukan penandaan terkait inflasi merupakan subkegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan, distribusi pangan, operasi pasar, dan subkegiatan lainnya yang terkait dengan pengendalian harga di daerah. Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat yang mengalokasikan belanja pengendalian inflasi per kapita di atas Rp100 ribu, memiliki tingkat inflasi di bawah 5 persen.

Sementara itu, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Jambi dengan belanja pengendalian inflasi per kapita di bawah Rp100 ribu, memiliki tingkat inflasi di atas 6 persen.

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan pemda. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah.

Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan);
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat.

Provinsi Riau mengalami inflasi sebesar 1,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,44. Inflasi Tahun Kalender (Januari - Juni) 2022 sebesar 5,30 persen dan inflasi Tahun ke Tahun (Juni 2021 - Juni 2022) sebesar 6,46 persen. inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga

yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,28 persen. Lalu, diikuti oleh, kelompok kesehatan sebesar 0,83 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,60 persen, kelompok transportasi sebesar 0,50 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,46 persen.

Kemudian, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,36 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,17 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen.

Komoditas yang memberikan andil peningkatan harga pada Juni 2022, antara lain cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit, ikan serai, angkutan udara, cabai hijau, dan tarif rumah sakit. Di sisi lain satu kelompok mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen. Adapun komoditas yang memberikan andil penurunan harga, antara lain daging ayam ras, ayam hidup, bawang putih. Sedangkan kelompok pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Dari 24 kota di Sumatera yang menghitung IHK, dua puluh dua kota mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Gunung sitoli sebesar 2,72 persen, diikuti oleh Pekanbaru sebesar 2,00 persen dan Dumai sebesar 1,56 persen.

Tren pemulihan perekonomian Riau terus berlanjut pada triwulan I 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,72% (yoY). Pertumbuhan ekonomi Riau mengalami akselerasi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh 3,81% (yoY). Akselerasi perekonomian Riau pada triwulan I 2022 ditopang oleh kinerja komponen investasi. Terjadinya permintaan terhadap komoditas Riau dan tren harga komoditas yang relatif tinggi turut mendorong investor untuk melakukan ekspansi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh peningkatan lapangan usaha (LU) Perdagangan dan LU Konstruksi. Akselerasi LU Perdagangan didorong oleh peningkatan kinerja perdagangan besar dan eceran, sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus positif COVID-19. Sementara itu, peningkatan kinerja pada LU

Konstruksi didukung oleh meningkatnya intensitas pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek infrastruktur strategis nasional.

**Tabel. 3.1.1.2
Inflasi Bulanan (Persen) Tahun 2023**

Kota/Inflasi	Inflasi (Persen) 2023							
	Januari	Februari	Maret	April	Maret	Juni	Juli	Agustus
Riau	0.67	0.14	-0.14	-0.02	0.07	0.20	0.43	-0.08
Tembilahan	0.52	0.13	-0.19	0.42	0.13	0.03	0.40	-0.54
Pekanbaru	0.63	0.19	-0.17	-0.01	0.02	0.20	0.37	-0.04
Dumai	0.84	-0.06	-0.02	-0.16	0.27	0.29	0.72	-0.11

Sumber : BPS Provinsi Riau

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan

daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.

Sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi menjadi pokok keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: 1) mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP); 2) mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian; 3) mendorong peningkatan tax ratio melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; 4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan 5) mendorong inovasi layanan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dilihat dari perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis, pada akhirnya semakin menuntut peran Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab. Dengan demikian mempertegas perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi pada unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka melaksanakan urusan wajib maupun pilihan Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kebupaten Kepulauan Meranti senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1) Pajak Daerah

- Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah dijalankan;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalian potensi;
- Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha;
- Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda;
- Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan;
- Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 DPPKA Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bank Persepsi;
- Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda pada wajib pajak yang lalai;
- Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak;
- Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi;
- Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang baru;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/ bimbingan teknis.

2) Retribusi Daerah:

- Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain.
- Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetorannya;
- Menindaklanjuti pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan seperti retribusi Pemadam Kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengoptimalkan pemungutan retribusi.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito;
- Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (AP);
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru.

5) Pendapatan Transfer:

- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil migas dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
- Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) serta Pajak Penghasilan;
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru;
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Bawa Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.336.805.430.689,00.-**

Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

- ❖ Pendapatan Asli Daerah **Rp. 261.683.432.689,00.-**
- ❖ Pendapatan Transfer **Rp. 1.075.121.998.000,00.-**
- ❖ Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp. 0,00.-**

Tabel. 4.1.2
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024

PENDAPATAN DAERAH		TARGET TAHUN 2024 (Rp)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	261.683.432.689,00
4.1.01.	Pajak Daerah	41.100.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	94.528.550.404,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	80.548.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.506.882.285,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.075.121.998.000,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.821.998.000,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	888.110.986.000,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	186.541.376.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	437.522.368.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.463.081.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	113.584.161.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
4.2.01.05.	Dana Desa	94.711.012.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.300.000.000,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	92.300.000.000,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.300.000.000,00
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	0,00
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.336.805.430.689,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran yang relatif terbatas jika dibandingkan permasalahan daerah yang harus diatasi;
- 2) Efektifitas dan efisien alokasi belanja lokalitas (setiap PD), bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi, serta lebih mengutamakan alokasi belanja untuk urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
- 3) Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isuisu strategis daerah;
- 4) Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara;
- 6) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 7) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/ kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan dan langkah antisipasinya;

- 8) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 9) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum;
- 10) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan Wajar Dikdas 12 tahun, serta menciptakan pendidikan berkualitas dan terjangkau;
- 11) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta upaya memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 12) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
- 13) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 3,48% diantaranya adalah melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan untuk balai pelatihan ketenagakerjaan;
- 14) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra

produksi di perdesaan, serta aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

- 15) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksplorasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 16) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi.
2. Belanja Modal.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk belanja tersebut adalah sebagai berikut :

→ *Belanja Operasi*, dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilannya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk belanja yang bersifat penggunaannya habis pakai. Belanja Hibah dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada instansi Vertikal serta masyarakat bersifat sosial kemasyarakatan, kepada kelompok/anggota masyarakat, organisasi, yayasan, rumah ibadah dan lainnya dalam rangka mendukung

pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang yang bersifat sosial kemasyarakatan, kepada kelompok/anggota masyarakat, organisasi, yayasan, rumah ibadah dan lainnya.

- ➔ *Belanja Modal*, dialokasikan untuk pembelajaran tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan irigasi.
- ➔ *Belanja Tidak Terduga*, dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, tidak biasa dan tanggap darurat.
- ➔ *Belanja Transfer*, dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan antar daerah Provinsi, antar daerah Kabupaten/Kota, kepada desa.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel. 5.1.2

**Proyeksi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024**

JENIS BELANJA		PERKIRAAN BELANJA 2024 (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	1.376.216.704.182,00
5.1.	Belanja Operasi	997.463.824.225,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	508.663.389.465,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	396.899.577.110,00
5.1.03.	Belanja Bunga	2.000.000.000,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	-
5.1.05.	Belanja Hibah	78.670.223.700,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.230.633.950,00
5.2.	Belanja Modal	217.154.527.721,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.683.243.608,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.523.245.313,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.631.993.000,00
5.2.05	Belanja Modal aset Tetap Lainnya	3.266.045.800,00
5.2.06	Belanja Modal aset Lainnya	50.000.000,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	159.098.352.236,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.980.965.900,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	157.117.386.336,00
JUMLAH		1.376.216.704.182,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(39.411.273.493,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 pada dasarnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2023 mencakup sisa dana pelaksanaan kegiatan, pelampaunan target pendapatan dan penerimaan. Pada APBD Tahun 2024 diproyeksikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp. 63.511.323.400,00**.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan mengalokasikan sebesar **Rp. 21.000.000.000,00** dengan rincian sebesar **Rp. 21.000.000.000,00** untuk Pembayaran Pokok Cicilan Utang yang Jatuh Tempo. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 3.100.049.907,00.

**Tabel. 6.1.2
Proyeksi Pembiayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024**

JENIS PEMBIAYAAN		PERKIRAAN PEMBIAYAAN 2024 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN	42.511.323.400,00
6.01	Penerimaan Pembiayaan	63.511.323.400,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya	63.511.323.400,00
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000.000,00
6.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	21.000.000.000,00
6.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	3.100.049.907,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		42.511.323.400,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan diantaranya :

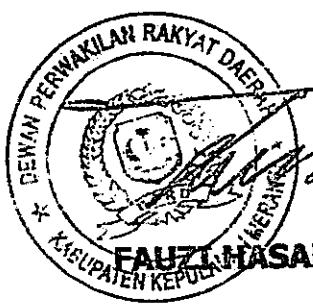
- ➔ Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- ➔ Pemungutan retribusi daerah yang potensial perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta secara selektif dan melalui pengkajian mendalam.
- ➔ Memperkecil jumlah tunggakan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- ➔ Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- ➔ Sosialisasi melalui media masa dan elektronik tentang tata bayar pajak.
- ➔ Melakukan konsultasi dan koordinasi dan monitoring ke daerah-daerah.
- ➔ Pelatihan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.

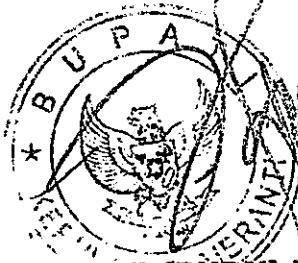
Selatpanjang, 27 November 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



[Signature]

PIL. BUPATI
KEPULAUAN MERANTI,



[Signature]